

**POLITIK & MILITER: EKSISTENSI MILITER DALAM
PERPOLITIKAN MESIR PADA KEPEMIMPINAN
ABDEL FATAH AL-SISI**



Oleh:

Lutfi Rosyad Alfikri, S.Psi.

21200011049

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Magister dalam Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Kajian Timur Tengah

YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfi Rosyad Alfikri
NIM : 21200011049
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 10 Oktober 2023

Saya yang Menyatakan



Lutfi Rosyad Alfikri

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
NIM: 21200011049

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfi Rosyad Alfikri

NIM : 21200011049

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

menyatakan bahwa naskah bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari tesis ini secara keseluruhan benar-benar terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Oktober 2023

Saya yang menyatakan



Lutfi Rosyad Alfikri

NIM: 21200011049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul : **POLITIK & MILITER: EKSISTENSI MILITER DALAM PERPOLITIKAN MESIR PADA KEPEMIMPINAN ABDEL FATAH AL-SISI**

Yang ditulis oleh:

Nama : Lutfi Rosyad Alfikri

NIM : 21200011049

Jenjang : Magister (S2)

Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister of Arts.

Yogyakarta, 10 Oktober 2023

Pembimbing



Dr. Ahmad Sahide, S.IP., M.A.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1165/Un.02/DPPs/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : Politik & Militer: Eksistensi Militer dalam Perpolitikan Mesir pada Kepemimpinan Abdel Fatah Al-Sisi

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LUTFI ROSYAD ALFIKRI, S.Psi
Nomor Induk Mahasiswa : 21200011049
Telah diujikan pada : Jumat, 17 November 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Mufid
SIGNED

Valid ID: 6572def7965ef

Penguji II

Dr. Ahmad Sahide, S.IP., M.A.



Penguji III

Dr. Subi Nur Isnaini
SIGNED

Valid ID: 656acc3a49959



Yogyakarta, 17 November 2023
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65852b84cc63b

ABSTRAK

LUTFI ROSYAD ALFIKRI (21200011049), POLITIK & MILITER: EKSISTENSI MILITER DALAM PERPOLITIKAN MESIR PADA KEPEMIMPINAN ABDEL FATAH AL-SISI, Tesis, Interdisciplinary Islamic Studies, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Tumbangnya Mubarak yang dipicu gerakan massa untuk mewujudkan keinginan rakyat menjadi negara demokrasi diambil alih kembali oleh militer dengan meng kudeta Mursi yang terpilih melalui pemilihan demokratis. Kegagalan demokrasi ini dialami Mesir atas gagalnya kesepakatan mengenai pembagian kekuasaan. Berangkat dari kesenjangan antara keinginan rakyat Mesir dengan kondisi perpolitikan Abdel Fatah Al-Sisi, menjadi ketertarikan untuk mengkaji kondisi perpolitikan Mesir dan kondisi demokrasi Mesir pada masa pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka. Adapun strategi dalam penelitian ini yakni studi kasus deskriptif dengan menganalisis secara mendalam melalui studi pustaka yang membahas terkait kebijakan Abdel Fatah Al-Sisi pada kisaran tahun 2013 hingga tahun 2022. Dalam melakukan analisis penelitian ini terbagi dalam lima tahap yakni pencocokan pola, menghubungkan data dengan proposisi, pembuatan penjelasan, analisis deret waktu, model logika, dan sintesis lintas kasus. Penggunaan teori Indeks demokrasi untuk melihat kondisi demokrasi Mesir yang dikeluarkan oleh Economist Intelligence Unit dipaparkan sesuai dengan data yang ada kemudian dianalisis setiap item dari indeks demokrasi tersebut seperti pemilihan umum yang berlangsung secara bebas dan adil, keamanan pemilih, pengaruh asing dan kemampuan aparat pemerintah dalam melaksanakan kebijakan. Kondisi perpolitikan Mesir tidak bisa dipisahkan dari peran militer didalamnya. Konsep praetorian dalam pembahasan tesis ini terbagi dalam dua tipe yakni tipe arbiter dan tipe penguasa. Tipe penguasa lebih mendeskripsikan kondisi perpolitikan Mesir yang didominasi oleh militer. Hal ini terlihat dalam beragam kebijakan yang dikeluarkan seperti nasionalisasi, ekstraksi, pembangunan institusi yang berada dalam kendali militer. Dilihat dari berbagai aspek yang menjadi indikator dalam global indeks demokrasi Mesir berada pada skor dibawah 4 dari tahun 2013 hingga 2022 yakni pada masa pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi. Hal ini menandakan bahwa demokrasi Mesir masih berada pada rezim otoriter.

Kata Kunci: Politik, Militer, Mesir, Abdel Fatah Al-Sisi.

ABSTRACT

LUTFI ROSYAD ALFIKRI (21200011049), POLITICS & MILITARY: THE EXISTENCE OF THE MILITARY IN EGYPTIAN POLITICS UNDER THE LEADERSHIP OF ABDEL FATAH AL-SISI, Thesis, Interdisciplinary Islamic Studies, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

The fall of Mubarak, which was triggered by a mass movement to realize the people's desire to become a democratic country, was taken over again by the military by coup d'etat Mursi who was elected through democratic elections. Egypt experienced this failure of democracy due to the failure of an agreement regarding the division of power. Starting from the gap between the desires of the Egyptian people and Abdel Fatah Al-Sisi's political conditions, it became interesting to study the political conditions of Egypt and the condition of Egyptian democracy during Abdel Fatah Al-Sisi's reign. This research uses a qualitative approach with literature study. The strategy in this research is a descriptive case study with in-depth analysis through a literature study that discusses Abdel Fatah Al-Sisi's policies in the period 2013 to 2022. In carrying out the analysis, this research is divided into five stages, namely pattern matching, connecting data with propositions, making explanations, time series analysis, logic models, and cross-case synthesis. The use of democracy index theory to see the condition of Egyptian democracy issued by the Economist Intelligence Unit is explained according to existing data and then analyzed for each item of the democracy index such as free and fair general elections, voter security, foreign influence and the ability of government officials to implement policy. Egypt's political condition cannot be separated from the military's role in it. The praetorian concept in the discussion of this thesis is divided into two types, namely the arbitrator type and the ruler type. The type of ruler better describes Egyptian political conditions which are dominated by the military. This can be seen in various policies issued such as nationalization, extraction, building institutions that are under military control. Judging from various aspects that are indicators in the global democracy index, Egypt scored below 4 from 2013 to 2022, namely during Abdel Fatah Al-Sisi's government. This indicates that Egyptian democracy is still in an authoritarian regime.

Keywords: Politics, Military, Egypt, Abdel Fatah Al-Sisi.

MOTTO

“Sebaik-baik Manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya”

HR. Ahmad¹



¹ HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad Daruqutni. Hadis ini dihasankan oleh al Albani di dalam *Shahihul Jami'*, Nomor 3289.

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk ibu, bapak, keluarga saya, mama, bapak dan
ndo' beserta pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hingga almamater
tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. penulis panjatkan atas segala limpahan rahmat, taufiq, hidayat serta inayahnya, kepada-Nya kami memohon pertolongan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada khatamul anbiyaa wa al mursaliin.

Alhamdulillah, penulisan tesis ini telah selesai. Penulis mengucapkan banyak ucapan terima kasih terhadap pihak yang memantu dan memberikan support terhadap penulisan tesis ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. selaku direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA. selaku ketua prodi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Najib Kailani, S.Fil.I.,M.A., Ph.D selaku sekertaris prodi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Seluruh dosen beserta staf Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang telah mengantarkan saya hingga saya sampai pada tahap penyelesaian tesis ini.
6. Dr. Ahmad Sahide, S.IP, M.A, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan sumbangan pikiran dalam masa bimbingan sehingga terselesaikannya tesis ini.
7. Bapak Rohidin dan Ibu Surati yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta tak pernah lupa mendoakan tanpa henti dan ikhlas demi lancarnya tugas tesis ini.
8. Kakak saya, Mukhtar Lutfi, Kamal Lutfi, Lutfi Indriyani, Lutfi Aulia Rahman dan Adik saya Lutfi Anjum Fadli yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Bapak Ahmad Saefi dan Ibu Siti Ngazizah yang telah memberikan doa dan dukungan untuk menyelesaikan tesis ini.
10. Zubaedah Nur Fajriah yang selalu menjadi penyemangat dalam mengerjakan tesis ini.
11. Sahabat-sahabat dan seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih penulis ucapkan atas *support* dan doa yang diberikan. Harapan dan doa penulis semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak

yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini diterima oleh Allah SWT serta mendapatkan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda. Aamiin.

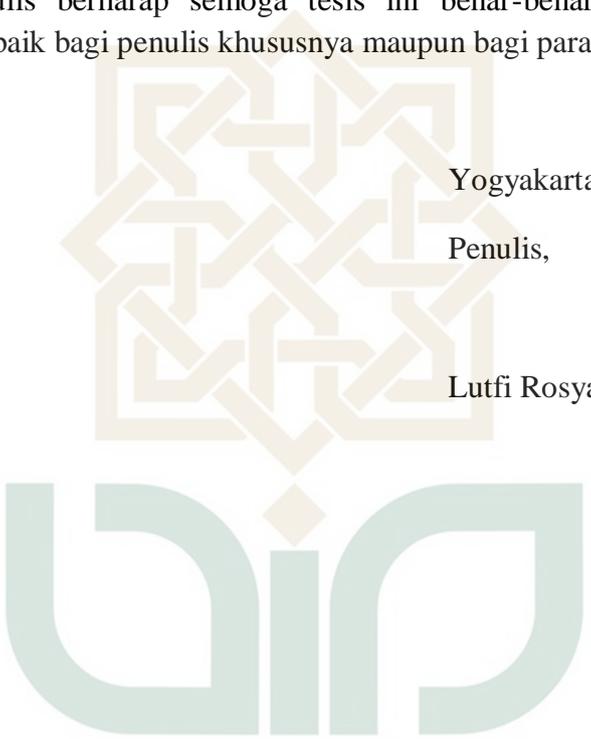
Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan oleh keterbatasan penulis dalam segala bidang. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca yang budiman demi sempurnanya tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini benar-benar dapat memberikan manfaat nyata baik bagi penulis khususnya maupun bagi para pembaca umumnya.

Yogyakarta, 10 Oktober 2023

Penulis,

Lutfi Rosyad Alfikri



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Teori	20
G. Metode Penelitian	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Subjek dan Objek Penelitian	31
3. Teknik Pengumpulan Data	32
4. Teknik Analisis Data	33
H. Sistematika Penulisan	34
BAB II KONDISI SOSIAL POLITIK MESIR	36
A. Kondisi Mesir Pra Revolusi.....	44

B. Revolusi Mesir	46
C. Kondisi Mesir Pasca Revolusi	50

BAB III DEMOKRASI MESIR HINGGA KEMUNCULAN ABDEL FATAH AL-SISI..... 57

A. Demokrasi pada Pemerintahan Mursi	57
B. Mesir pada Masa Rezim Abdel Fatah Al-Sisi	61

BAB IV DEMOKRASI MESIR ERA ABDEL FATAH AL-SISI..... 68

A. Demokrasi Otoriter Abdel Fatah Al-Sisi	76
1. Kebebasan Pers Mesir	77
2. Proses Pemilu Mesir	79
3. Penangkapan Ikhwanul Muslimin	80
B. Relasi Militer dan Negara pada Pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi	84
1. Posisi Militer dalam Aspek Politik Mesir	85
2. Posisi Militer dalam Aspek Ekonomi Mesir	88
3. Posisi Militer dalam Aspek Sosial Mesir	89
C. Analisis Relasi Militer dan Negara pada Pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi	107

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	113
B. Saran	114

DAFTAR PUSTAKA 116

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pola Global Status Of Democracy Indices 25



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hasil Pemilu Mesir Tahun 2011	79
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tumbangnya rezim otoriter Mesir Hosni Mubarak yang didorong oleh gerakan massa menjadi kesempatan untuk mewujudkan keinginan rakyat menjadi negara demokrasi.² Namun, pemerintahan yang diambil alih oleh kaum militer mengembalikan dominasi militer dalam tubuh politik Mesir.³ Keterlibatan militer dalam tubuh politik Mesir diawali oleh organisasi perwira bebas (*free officer*) yang menggulingkan rezim Raja Al Farouk pada tahun 1952⁴ hingga kudeta terhadap pemerintahan Mursi di tahun 2013.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa negara Mesir mengalami kegagalan demokrasi yang terlihat pada kalangan elite politik atas gagalnya kesepakatan mengenai pembagian kekuasaan serta nihilnya kesepakatan antara kelompok Islam dengan kelompok liberal-sekuler dalam mempertahankan Mursi sebagai Presiden yang terpilih secara demokrasi serta krisis ekonomi yang tidak bisa diselesaikan secara cepat.⁶

² Amri Muslih, Hurriyah, "Aktor Politik dan Gagalnya Transisi Demokrasi Mesir Tahun 2011-2013", *Jurnal Politik 2*, no. 1 (2016): 42.

³ Bintang Mei Syiam Astri Ilmania, "Pemerintah Otoriter Mesir diBawah Presiden Abdel Fattah Al-Sisi Pasca Kudeta Militer Tahun 2013 (The Authoritarian Government of Egypt under President Abdel Fattah Al-Sisi, Administration after Military Coup 2013)", *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, (2017): 3.

⁴ Samir, M. Hamdan Basyar, "Kegagalan Demokratisasi di Mesir Pasca-Arab Spring (The Failure of Democratization in Egypt Post Arab Spring)", *Jurnal Penelitian Politik 18*, no. 2 (2021): 168.

⁵ Masoud Rezaei, Egypt and "Democracy Dilemma", *African Journal of Political Science and International Relations 9*, no. 6 (2015): 3.

⁶ Basyar, "Kegagalan Demokratisasi", 165.

Bermula dari pemilu 2005 yang dimenangkan oleh Hosni Mubarak memberikan kesan buruk akibat partisipasi rakyat Mesir yang hanya 23 persen.⁷ Tidak hanya kecilnya persentase keterwakilan rakyat dalam partisipasi dalam pemilu namun juga dikarenakan kekuasaan Hosni Mubarak yang telah berlangsung lama. Kekuasaan Hosni Mubarak yang telah berselang 30 tahun juga mendorong rakyat Mesir untuk bergerak melalui *people power*. Tidak hanya itu, kemiskinan dan pengangguran yang meluas juga menyebabkan dukungan rakyat terhadap Hosni Mubarak mengalami penurunan drastis sehingga dinilai perlu untuk perbaikan ekonomi melalui *The Arab Spring*.⁸

Arab Spring Mesir timbul dari jalinan masalah internal dan eksternal. Bermula dari pelanggaran HAM serta iklim politik Hosni Mubarak yang totaliter, melalui melibatkan militer yang dibangun dalam sistem politiknya dan juga faktor negara lain yang turut memberikan pengaruh kuat terhadap perpolitikan Mesir yang kemudian menimbulkan faksi politik.⁹ Gerakan rakyat Mesir yang didorong oleh media sosial ini memberikan tanda bahwa rezim Mubarak akan berakhir. Barisan militer yang merupakan bagian dari kepemimpinan Mubarak tidak lagi menjadi barisan pelindung yang sejalan dengan kekuasaan Hosni Mubarak, sehingga militer menjadi bagian dari aksi demonstrasi di *Tahrir Square*. Selain itu, peringatan dari Washington untuk memberhentikan tindakan kekerasan terhadap demonstran juga menjadi

⁷ Ahmad Sahide, *The Arab Spring: Tantangan dan Harapan Demokratisasi*, (Jakarta: Kompas, 2019), 57.

⁸ *ibid*, 76.

⁹ *ibid*, 54-57.

pertanda bahwa Hosni Mubarak akan turun dari masa pemerintahannya. Hingga tanggal 11 Februari 2011 Omar Suleiman sebagai wakil presiden mengumumkan pengunduran diri dari Hosni Mubarak serta memberikan kekuasaan Mesir kepada Dewan Agung Militer.¹⁰

Turunnya Hosni Mubarak memberikan udara segar untuk mentransformasi perpolitikan Mesir. Rakyat Mesir yang sudah mengidam-idamkan sistem pemerintahan yang demokrasi, melalui pengangkatan presiden dari kalangan sipil setelah sebelumnya pemilihan presiden berasal dari militer. Hal ini juga dijadikan sebagai momentum pemilu yang dilaksanakan secara terbuka, bebas serta demokratis.¹¹ Namun beragam kekhawatiran muncul pada nasib transisi demokrasi Mesir yang dikhawatirkan akan ada penjangkauan partai yang dominan,¹² hal ini tidak terbukti. Akan tetapi bahwa Mursi mendapatkan penolakan oleh *Supreme Constitutional Court* (SCC) atas kebijakannya dengan membuat dewan konstituante sebagai langkah lanjutan dari pengeluaran dekret yang berisi empat pasal yang bertujuan untuk menghidupkan kembali posisi parlemen serta meredam kekuasaan kalangan militer. Dekret tersebut memicu protes rakyat, namun di tengah ketegangan ini, kelompok Islam menyiapkan draft konstitusi yang telah siap untuk direferendum.¹³

¹⁰ *ibid*, 78-79.

¹¹ Basyar, "Kegagalan Demokratisasi", 160.

¹² Thomas Carothers dan Nathan J. Brown, *The Real danger for Egyptian democracy, Carnegie Endowment for International Peace*. 12 November 2012, <https://carnegieendowment.org/2012/11/12/real-danger-for-egyptian-democracy-pub-49940>.

¹³ Basyar, "Kegagalan Demokratisasi", 164.

Mursi memang menjadi presiden yang terpilih secara demokratis, namun setelah Mursi menduduki kursi presiden, justru menjadi masa menegangkan yang menjadi awal krisis politik Mesir. Hal tersebut karena unjuk rasa yang ada untuk menuntut Mursi turun dari kursi kepresidenan. Penyebabnya yakni karena parlemen yang terbentuk terlalu didominasi oleh Islam (Ikhwanul Muslimin). Adapun rakyat menginginkan pemerintahan yang proporsional.¹⁴

National Salvation Front (NSF) yang merupakan gabungan kekuatan kelompok sekuler yang merasa dikhianati oleh militer dan Ikhwanul Muslimin (IM), kemudian menjadi oposisi politik utama Mursi di Mesir merespons hal ini dengan melakukan kampanye penolakan untuk memilih ‘tidak’ dalam referendum konstitusi. Akan tetapi bahwa draft konstitusi baru tersebut berhasil disepakati dan ditandatangani oleh Presiden Mursi pada 26 Desember 2012. Upaya ini tidak cukup berhasil untuk meredam aksi para pendemo, meskipun dekrit dinyatakan dicabut. Aksi protes yang terus berlanjut memperparah perpecahan dan polarisasi rakyat Mesir, sehingga hal ini semakin merusak proses transisi demokrasi di Mesir.¹⁵

Gerakan *Tamarod* atau pembangkangan terjadi di lapangan Tahrir sebagai ajang demokratisasi dalam menggulingkan Mursi melalui petisi. Tidak hanya datang dari seruan kalangan anti penguasa, kalangan pro penguasa juga menyuarakan secara lantang bahwa posisi rakyat adalah benar.

¹⁴ Agia Khumaesi & Endah Hapsari, “Ikhwanul Muslimin Dominasi Parlemen Baru Mesir,” *Republika Online*, 24 Juni 2013, <https://internasional.republika.co.id/berita/ly890c/ikhwanul-muslimin-dominasi-parlemen-baru-mesir>.

¹⁵ Basyar, “Kegagalan Demokratisasi”, 164.

Kondisi ini dijadikan elite militer sebagai kesempatan untuk kembali menguasai dunia politik Mesir. Hal ini membuat kondisi semakin rusuh, sehingga militer mengeluarkan ultimatum untuk menyelesaikan permasalahan perpolitikannya dalam kurun waktu 48 jam kepada Mursi. Penolakan Mursi berakhir pada pengalihan kekuasaan oleh militer yang dilancarkan pada 3 Juli 2013 malam, sehingga kudeta militer ini berakibat pada Mursi yang dijadikan tahanan militer Mesir.¹⁶

Kekuasaan yang diambil alih oleh militer memberikan kesempatan militer untuk mengatur sistem pemilu sesuai dengan kepentingannya hingga Mesir mengesahkan konstitusinya pada tahun 2014 yang sangat menguntungkan pihak militer, karena militer saat itu menduduki kekuasaan tertinggi di Mesir. Kesempatan ini diambil oleh Jendral Abdel Fatah Al-Sisi yang berhasil memenangkan pemilu presiden tahun 2014. Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Mesir ini kemudian menetapkan organisasi Ikhwanul Muslimin (IM) sebagai organisasi terlarang.¹⁷

Kondisi demokrasi Mesir pada pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi dikategorikan sebagai rezim otoriter. Hal ini termuat dalam perhitungan menurut indeks demokrasi yang dikeluarkan oleh Economic Intelligence Unit.¹⁸ Kebijakan Abdel Fatah Al-Sisi dalam pemerintahannya memberlakukan otoritas kekuasaannya terhadap seluruh elemen sosial serta

¹⁶ *ibid*, 164-165.

¹⁷ *ibid*, 165-166.

¹⁸ Kelley Friel, "Global State of Democracy Indices, International IDEA, Institute for democracy and electoral assistance" 12 September 2023, <https://www.idea.int/data-tools/tools/global-state-democracy-indices>.

ekonomi dalam segala aspek yang ada di Mesir.¹⁹ Militerisasi dalam pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi memberikan kedudukan eksklusif yang tinggi dalam sistem negaranya. Keterlibatan militer dalam pemerintahan Mesir dikembalikan dengan wajah yang berbeda²⁰ walaupun masih dengan ciri khas kepemimpinan di Timur Tengah yakni otoriter. Hal ini bermakna bahwa militer memiliki posisi dalam perpolitikan di Mesir. Namun idealnya dalam sistem demokrasi yang diemukakan oleh Dr. Dietrich bahwa militer bersifat netral dalam politik.²¹ Namun realitanya bahwa Abdel Fatah Al-Sisi memiliki latar belakang militer dan lebih mengedepankan pembangunan dalam kemajuan militer Mesir.²²

Hal yang menjadi ketertarikan untuk melakukan penelitian ini bermula pada kondisi geografis yang strategis dalam nilai ekonomis dan politik dalam terusan Suez yang menghubungkan laut Mediterania, dan laut tengah yang kemudian tersambung dengan samudra Hindia menjadi penting dalam jalur perairan dunia. Sejarah peradaban yang tinggi serta menjadi peradaban tertua dalam bidang pendidikan, tata negara, hukum, kesenian, ilmu, serta teknologi menghiasi sejarah kemajuan Mesir, hingga pada posisi militer dalam dunia perpolitikan Mesir.²³ Kondisi perpolitikan dalam sejarah Mesir atas kudeta rezim Mubarak yang berasal dari kalangan militer dan Mursi yang berasal

¹⁹ Neil Russell, "Reconstituted authoritarianism: Islam, service provision and the state in al-Sisi's Egypt", *Democratization* 30 no.1, (2023): 21.

²⁰ Bosmat Yefet dan Limor Lavie, "Legitimation in post-revolutionary Egypt: Al-Sisi and the renewal of authoritarianism", *Wiley Article, Digest of Middle East Studies*; no. 00, (2021): 15.

²¹ Tim KontraS, *Politik Militer dalam Transisi Demokrasi Indonesia*, Jakarta: (2005).

²² Russell, "Reconstituted authoritarianism: Islam, 18.

²³ Ahmad Sahide, *The Arab Spring: Tantangan dan Harapan Demokkratisasi*, (Jakarta: Kompas, 2019), 48-51.

dari sipil yang menimbulkan dramatisasi sosial politik Mesir, akan tetapi posisi militer tetap kembali tegak kokoh dan tidak tergantikan.²⁴ Hal ini menjadi penting untuk dibahas karena kekuatan *civil society* yang cukup kuat dalam peristiwa *Arab Spring* di masing-masing negara, Mesir juga mengalami hal serupa, namun posisi militer yang menjadi pembeda dengan negara-negara lain sehingga kedudukannya masih terus eksis dalam perpolitikan Mesir.²⁵ Tidak hanya sistem perpolitikan yang menjadi ketertarikan dalam penelitian ini, latar belakang sejarah dengan peradaban tinggi dan tertua dalam berbagai bidang termasuk tata negara, dan juga letak geografis yang strategis juga menjadikan Mesir sebagai negara yang penting dalam dunia.

Tinjauan terdahulu yang selaras dengan penelitian ini yakni penelitian yang telah dilakukan oleh Arshad²⁶ yang menjelaskan terkait dengan kebijakan praetorian Abdel Fatah Al-Sisi di Negara Mesir. Adapun sistem demokrasi Mesir dibahas oleh Masoud Rezaei²⁷ dengan menjelaskan terkait dengan kondisi pemerintahan Abdel Fattah Al-Sisi, otoritas pemerintah kembali diterapkan dalam sistem parlementer negara Mesir. Hal ini menandakan bahwa demokrasi negara Mesir masih sangat minim, sehingga hal ini menjadi ketertarikan peneliti untuk mengkaji dan menganalisis sistem demokrasi serta sistem perpolitikan yang diterapkan di negara Mesir.

²⁴ Afini Nurdina Utami & Syaiful Anam, "Dominasi Militer dalam Politik dan Pemerintahan di Mesir: Kegagalan Demokratisasi di Mesir pada Kudeta 2013", *Review of International Relations* 4 no. 2 (2022): 140-141.

²⁵ *ibid*, 133-134.

²⁶ Arshad, "Understanding the Praetorian Rule of Fatah al-Sisi in Egypt", *PanAfrican Journal of Governance and Development* 2 no. 2 (2021): 119-138.

²⁷ Rezaei, "Egypt and Democracy", 1-15.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, mendorong peneliti untuk mengkaji secara khusus bahwa penelitian ini berusaha untuk menganalisis lebih lanjut terkait dengan sistem parlementer Negara Mesir yang diterapkan oleh Abdel Fatah Al-Sisi untuk menuju negara demokrasi. Aspek kajian yang menjadi pembahasan dalam tesis ini akan dibahas terkait dengan sistem perpolitikan Negara Mesir pada periode Abdel Fatah Al-Sisi saat ini, alasan Mesir menjadi negara otoriter, hingga relasi negara dan militer pada masa pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi. Sistem perpolitikan ini melahirkan kebijakan-kebijakan Abdel Fatah Al-Sisi yang mempengaruhi kebebasan dan sistem demokrasi Negara Mesir. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan sistem perpolitikan Abdel Fatah Al-Sisi.

B. RUMUSAN MASALAH

Uraian latar belakang yang dipaparkan memberikan gambaran terkait penelitian yang akan dilaksanakan. Peneliti dalam hal ini memberikan batasan sebagai fokus penelitian yang dikaji lebih mendalam. Pemberian batasan dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi penelitian dalam karya tulis supaya tidak terlalu melebar dalam fokus kajiannya. Subjek penelitian dilakukan kepada kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam masa pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi serta strategi pemerintahan yang diupayakan Negara Mesir.

Guna memperjelas dan memberikan fokus kajian dalam penelitian ini lebih dipersempit pada kajian awal mula pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi

yang menimbulkan berbagai polemik dan permasalahan dalam beberapa aspek rakyat seperti politik dan ekonomi hingga sosial. Konflik politik yang terjadi atas penggulingan pemerintahan sebelumnya yakni Mursi meninggalkan bekas pada tatanan pemerintahan Mesir. Konflik ekonomi yang diturunkan dari pemerintahan sebelumnya yang terjadi hingga berakibat kepada konflik sosial seperti pengangguran, pendidikan dan kebebasan berekspresi, bersuara hingga bertindak yang terbatas sehingga menekan rakyat untuk tidak mencampuri urusan pemerintahan. Maka rumusan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana kondisi perpolitikan Mesir pada masa Abdel Fatah Al-Sisi?
2. Mengapa Mesir pada masa pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi menjadi negara otoriter?
3. Bagaimana relasi militer dan negara pada masa pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Rumusan masalah yang diajukan memberikan gambaran terkait dengan kondisi dan situasi politik Mesir pada masa pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi sehingga dari hal tersebut memberikan rumusan tujuan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui kondisi perpolitikan negara Mesir masa Abdel Fatah Al-Sisi
2. Untuk mengetahui alasan Mesir menjadi negara otoriter pada masa pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi.

3. Untuk mengetahui relasi militer dan negara pada pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi?

D. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

1. Signifikansi Akademis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan memperluas khazanah keilmuan serta bisa dijadikan sebagai sebuah sumbangan pemikiran pustaka terkait kondisi perpolitikan Mesir di masa Abdel Fatah Al-Sisi dan kebijakan-kebijakannya serta kondisi demokrasi yang terjadi di Negara Mesir.

2. Signifikansi Praktis

Signifikansi praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan dalam memberikan gambaran terkait dengan kondisi perpolitikan Mesir pada masa pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi. Adapun bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan ataupun referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai sistem perpolitikan yang ada di Mesir pada masa Abdel Fatah Al-Sisi. Sedangkan bagi peneliti sendiri, penelitian ini menjadi wadah untuk menganalisis sistem perpolitikan secara umum, khususnya perpolitikan di negara Mesir.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menjadi salah satu referensi dalam penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk memperluas kajian teori yang akan digunakan. Berdasarkan hasil penelusuran dan analisis yang telah dilakukan,

terdapat beberapa kajian yang menjadi bahasan pokok yakni terkait dengan perpolitikan Mesir pada masa Abdel Fatah Al-Sisi, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Abdel Fatah Al-Sisi serta pembahasan terkait dengan demokrasi Mesir.

1. Perpolitikan dan Kebijakan Mesir masa Abdel Fatah Al-Sisi

Penelitian Hardi Alunaza & Virginia Sherin²⁸ mengkaji tentang cara presiden Abdel Fattah Al-Sisi mengatur pemerintahan yang berlangsung pasca revolusi 2011. Fokus kajian yang membahas kebijakan dalam aspek ekonomi, dampak positif serta peran Abdel Fatah Al-Sisi dalam perkembangan ekonomi Mesir pasca revolusi tahun 2011. Johan F ranzén & Alexander Brown²⁹ mengkaji tentang Abdel Fatah Al-Sisi dalam menduduki jabatan presiden di negara Mesir dan Lucia Ardovini³⁰ yang mengkaji secara deskriptif sistem pemerintahan yang berjalan dari masa pemerintahan Mubarak hingga Abdel Fattah Al-Sisi.

Bosmat Yefet dan Limor Lavie³¹ mendeskripsikan strategi legitimasi adaptif Al-Sisi dengan wajah dan bentuk yang baru sebagai hasil dari pemberontakan tahun 2011. Kemampuan adaptif rezim yang tidak terbatas pada penegasan kontrol negara atas sistem ekonomi, hukum, dan

²⁸ Virginia Sherin & Hardi Alunaza, "The Role of President Abdel Fattah Al-Sisi's Government for the Development of Egypt's Post-Revolutionary Economic Reforms in 2011", *Journal CMES* 14, no. 2 (2021): 93-100.

²⁹ Johan F ranzén & Alexander Brown, *Egypt's Praetorian Guards To what extent did General Abdel Fattah alSisi's discourse undermine Egypt's first democratically elected president?*, thesis, (School of Political, Social and International Studies, University of East Anglia, 2014).

³⁰ Lucia Ardovini, "Egypt's unbreakable curse: Tracing the State of Exception from Mubarak to Al-Sisi", *Mediterranean politics* 25, no. 4 (2020): 1-20.

³¹ Bosmat Yefet dan Limor Lavie, "Legitimation in post-revolutionary Egypt: Al-Sisi and the renewal of authoritarianism," *Wiley Article, Digest of Middle East Studies* 1, no. 16 (2021): 170-185.

keamanan, maupun pada pembingkai ulang kebijakan dan praktik sebelumnya, melainkan dibarengi dengan upaya untuk menyesuaikan klaim legitimasi dengan harapan dan kepentingan normatif publik. Dijelaskan dalam Stephen Roll dan Luca Mische³² bahwa kebijakan Mesir dalam pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi didominasi oleh kepentingan militer Mesir, sehingga kesan otoriter menjadi identik pada pemerintahan Mesir.

Neil Russell³³ mengkaji tentang sistem pemerintahan otoriter Mesir yang dijadikan sebagai alat untuk menetralkan kondisi sosial dan ekonomi Mesir dalam pemerintahan rezim Abdel Fatah Al-Sisi yang dijelaskan dalam penelitian Walter Armbrust³⁴ sebagai hasil revolusi serta contoh dari otoritarianisme baru yang justru membahayakan politik Mesir. Namun, Gamal M. Selim³⁵ menganalisis berbagai kebijakan Abdel Fatah Al-Sisi yang telah membawa Mesir pada poros yang strategis terhadap Rusia dan Tiongkok, serta turunnya kemitraan strategis tradisionalnya dengan Amerika. Hal ini telah memberikan dampak keseimbangan besar dalam hubungan luar negeri Mesir dengan kekuatan global dan regional. Meskipun Jannis Julien Grimm³⁶ mengungkapkan bahwa kebijakan Abdel Fatah Al-Sisi dalam perpindahan kepulauan Tiran dan Sanafir ke Arab

³² Stephen Roll and Luca Mische, "Egypt Engulfed by Militarism, MPC's. Middle East and Turkey", *Geographical Overview*, (2019): 205-208.

³³ Russell, "Reconstituted authoritarianism", 1-21.

³⁴ Walter Armbrust, "Trickster Defeats the Revolution: Egypt as the Vanguard of the New Authoritarianism", *Middle East Critique* 26, no.3 (2017): 1-35.

³⁵ Gamal M. Selim, "Egyptian foreign policy after the 2011 revolution: the dynamics of continuity and change", *British Journal of Middle Eastern Studies*, (2020): 1-22.

³⁶ Jannis Julien Grimm, "Egypt is not for sale! Harnessing nationalism for alliance building in Egypt's Tiran and Sanafir island protests", *Mediterranean Politics* 24, no. 4 (2019): 443-466.

Saudi pada awal tahun 2016 menjadi katalis bagi pembentukan subjek oposisi dan munculnya koalisi protes yang tidak terduga.

Masooda Bano & Hanane Benadi³⁷ juga memberikan penjelasan terkait tentang pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi yang dengan terampil mengerahkan dua lembaga keagamaan dikontrol oleh negara yakni Kementerian Wakaf dan *Dar-ul-Ifta*. Tidak hanya dalam kelembagaan Islam. Paul S. Rowe³⁸ juga turut mengungkapkan bahwa otoritas rezim Mesir serta kemitraannya dengan neo-militer memberikan pengaruh pada rakyat sipil koptik. Hal ini karena Gereja tetap menjadi tempat partisipasi bagi sebagian besar umat Koptik dan banyak organisasi Gereja yang mampu memberikan layanan sosial, peluang media, dan akses ke dalam organisasi komunitas kepada setiap warga negara. Bosmat Yefet³⁹ menjelaskan tentang kebijakan Abdel Fatah Al-Sisi dalam upaya transnasional melalui strategi kebijakan diaspora.

Muhammad Khoirul Huda⁴⁰ yang menganalisis relasi bilateral dengan Negara Israel di pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi. Adapun Jan Claudius Völkel⁴¹ memberikan analisis deskriptifnya terkait dengan kontribusi parlemen Mesir terhadap Negeranya yang dianggap masih

³⁷ Masooda Bano & Hanane Benadi, "Regulating religious authority for political gains: al-Sisi's manipulation of al-Azhar in Egypt", *Third World Quarterly*, (2017): 1604-1621.

³⁸ Paul S. Rowe, "The church and the street: Copts and interest representation from Mubarak to Sisi", *Religion, State & Society* 48, no. 5 (2020): 343-360.

³⁹ Bosmat Yefet, "Egypt's diaspora policy in the post-June 2013 era as a transnational mechanism of regime legitimation", *Globalizations*, (2023): 1-18.

⁴⁰ Muhammad Khoirul Huda, Analisis Peningkatan Hubungan Mesir – Israel Pada Periode Pertama Masa Pemerintahan Abdel Fattah Al-Sisi Tahun 2014-2018, *Dauliyah (Journal Of Islamic And International Affairs)* 3, no. 2 (2018): 285-300.

⁴¹ Jan Claudius Völkel, "Sidelined by design: Egypt's parliament in transition", *The Journal of North African Studies* 22, no. 4, (2017): 595-619.

terbatas, sehingga hal ini diasumsikan akan terus terjadi dalam kurun waktu ke depan. Kebijakan dalam penelitian yang telah dilakukan tersebut menjadi acuan kajian dalam penelitian ini yang akan dijadikan rujukan. Namun hal yang perlu digarisbawahi bahwa penelitian yang akan dilakukan yakni beberapa aspek kebijakan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi.

2. Demokrasi Mesir

Penelitian yang telah dilakukan oleh Maha Azam⁴² menjelaskan warisan otoriter pemerintahan Mesir semenjak 60 tahun lalu, hingga rakyat melakukan protes dan sampai pada masa pemilu yang dimenangkan oleh Morsi dari alangan sipil. Namun, Mursi tidak dapat mengatasi tantangan politik dengan wajah demokrasi yang baru. Kemudian Samir & M Hamdan Basyar⁴³, mengkaji fenomena demokratisasi di Negara Mesir yang gagal setelah terjadinya Arab Spring. Kajian tersebut kemudian lebih diperdalam dari kajian Maulana Arief Alfian⁴⁴ yang memberikan gambaran terkait proses demokratisasi di Mesir hingga bemuara pada sistem pemerintahan yang kembali lagi pada sistem otoriter dan kembali pula pada pemerintahan militer di bawah Abdel Fatah Al-Sisi.

⁴² Maha Azzam, "Egypt's Democratic Experiment: Challenges to a Positive Trajectory", *Insight Turkey* 15, no. 2 (2013): 157-168.

⁴³ Basyar, "Kegagalan Demokratisasi", 159-169.

⁴⁴ Maulana, Arief Alfian, "Analisis Fluktuasi Demokratisasi di Mesir Pasca Lengsernya Hosni Mubarak", *Thesis*, (Universitas Muhammadiyah Malang, 2022).

Andrea Teti and Gennaro Gervasio⁴⁵ memberikan penjelasan terkait dengan gerakan yang diambil serta tantangan dan hambatan revolusi Mesir yang dialami rezim pasca Hosni Mubarak. Thomas Carothers dan Nathan J. Brown⁴⁶ kemudian melanjutkan pembahasannya terkait nasib transisi demokrasi Mesir pada masa pemerintahan Mursi yang menimbulkan kekhawatiran pada penjangkauan partai yang dominan. Nadim Mirshak⁴⁷ memberikan kajian demokrasi terbaru pada rezim Abdel Fatah Al-Sisi melalui perlawanan terselubung yang dalam hal ini dipahami dengan istilah Gramscian. Hal ini kemudian diterangkan oleh Bárbara Azaola Piazza⁴⁸ terkait dengan konsolidasi dalam berbagai elemen pemerintahan yang dilakukan oleh rezim Abdel Fatah Al-Sisi untuk mempertahankan kedudukannya yang menimbulkan demokrasi rakyat Mesir kurang dirasakan. Ahmad Sahide⁴⁹ juga menjelaskan secara luas terkait dengan proses demokratisasi yang telah terjadi di Tunisia serta persebarannya hingga negara-negara Timur Tengah.

Beberapa penelitian tersebut memberikan referensi dalam rangka memperkaya kajian dalam penelitian ini. Dalam bagian ini akan dipaparkan terkait kajian pusaka dalam penelitian ini sesuai dengan temanya dan sesuatu

⁴⁵ Andrea Teti and Gennaro Gervasio, "After Mubarak, Before Transition: The Challenges for Egypt's Democratic Opposition, Interface", *a journal for and about social movements* 4, no.1 (2012): 102-112.

⁴⁶ Thomas Carothers dan Nathan J. Brown, "The Real danger".

⁴⁷ Nadim Mirshak, "Rethinking resistance under authoritarianism: civil society and non-contentious forms of contestation in post-uprisings Egypt", *Social Movement Studies* (2019): 702-719.

⁴⁸ Bárbara Azaola Piazza, "The Consolidation of Authoritarianism in al-Sisi's Egypt", *Geographical Overview, Middle East and Turkey*, (2018): 216-219.

⁴⁹ Ahmad Sahide, *The Arab Spring: Tantangan dan Harapan Demokratisasi*, (Jakarta: Kompas, 2019).

yang menjadi pembeda dengan kajian penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian ini berpusat pada tema tentang eksistensi Abdel Fatah Al-Sisi dalam perpolitikan Mesir serta kondisi demokrasi Mesir pada masa Abdel Fatah Al-Sisi. Mengindik pada penelitian sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang selaras dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tentang perpolitikan Abdel Fatah Al-Sisi yang telah diteliti oleh Hardi Alunaza & Virginia Sherin⁵⁰ Johan F ranzén & Alexander Brown⁵¹, Lucia Ardovini⁵² dan Bosmat Yefet dan Limor Lavie⁵³. Adapun perbedaannya yakni pada objek penelitian yang akan dilakukan. Objek penelitian yang telah dilakukan oleh Hardi Alunaza & Virginia Sherin yakni penelitian tentang kebijakan yang tersorot dalam ranah ekonomi pada masa Abdel Fatah Al-Sisi, Johan F ranzén & Alexander Brown medeskripsikan tentang wacana perpolitikan Abdel Fatah Al-Sisi dalam menjatuhkan Morsi yang telah terpilih secara demokratis, Lucia Ardovini membahas pemerintahan Mubarak hingga Abdel Fatah Al-Sisi, dan Bosmat Yefet dan Limor Lavie yang membahas strategi legitimasi baru yang dilakukan oleh Abdel Fatah Al-Sisi.

⁵⁰ Virginia Sherin & Hardi Alunaza, "The Role of President Abdel Fattah Al-Sisi's Government for the Development of Egypt's Post-Revolutionary Economic Reforms in 2011", *Journal CMES* 14, no. 2 (2021): 92-101.

⁵¹ Johan F ranzén & Alexander Brown, *Egypt's Praetorian Guards To what extent did General Abdel Fattah alSisi's discourse undermine Egypt's first democratically elected president?*, thesis, (School of Political, Social and International Studies, University of East Anglia, 2014).

⁵² Lucia Ardovini, "Egypt's unbreakable curse: Tracing the State of Exception from Mubarak to Al-Sisi", *Mediterranean politics* 25, no. 4, (2020): 456-475.

⁵³ Bosmat Yefet, "Egypt's diaspora policy in the post-June 2013 era as a transnational mechanism of regime legitimation", *Globalizations*, (2023): 1-18.

Selain beberapa penelitian yang telah disebutkan, ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh Stephen Roll dan Luca Mieke⁵⁴, Neil Russell⁵⁵, Walter Armbrust⁵⁶. Ketiga penelitian ini mengkaji sistem otoriter dalam pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi. Adapun perbedaan ketiga penelitian ini terdapat pada objek kajian yang diteliti. Objek penelitian yang dilakukan oleh Stephen Roll dan Luca Mieke mengkaji tentang kebijakan Abdel Fatah Al-Sisi dalam perpolitikan Mesir. Neil Russell mengkaji tentang otoritas rezim Mesir yang dijadikan alat untuk menetralkan sosial dan ekonomi Mesir, sedangkan Walter Armbrust meneliti hasil dari kebijakan otoriter rezim Abdel Fatah Al-Sisi.

Masooda Bano & Hanane Benadi⁵⁷, Paul S. Rowe⁵⁸, Bosmat Yefet⁵⁹ serta Jan Claudius Völkel⁶⁰ membahas terkait dengan upaya pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi dalam mengarahkan Mesir melalui berbagai kebijakan yang ada di Mesir. Masooda Bano & Hanane Benadi menganalisis tentang lembaga keagamaan yang berjalan pada masa Abdel Fatah Al-Sisi yakni Kementerian Wakaf dan *Dar-ul-Ifita*. Sedangkan Paul S. Rowe menganalisis otoritas Abdel Fatah Al-Sisi dalam kebijakan neo-militernya. Adapun Bosmat Yefet

⁵⁴ Stephen Roll and Luca Mieke, "Egypt Engulfed by Militarism, MPC's. Middle East and Turkey", *Geographical Overview*, (2019): 205-209.

⁵⁵ Neil Russell, "Reconstituted authoritarianism: Islam, service provision and the state in al-Sisi's Egypt", *Democratization* 30, no. 1 (2021): 1-21.

⁵⁶ Walter Armbrust, "Trickster Defeats the Revolution: Egypt as the Vanguard of the New Authoritarianism", *Middle East Critique* 26, no. 3 (2017): 221-239.

⁵⁷ Masooda Bano & Hanane Benadi, "Regulating religious authority for political gains: al-Sisi's manipulation of al-Azhar in Egypt", *Third World Quarterly* (2017): 1604-1621.

⁵⁸ Paul S. Rowe, "The church and the street: Copts and interest representation from Mubarak to Sisi, Religion", *State & Society* 48, no. 5, (2020): 343-360.

⁵⁹ Bosmat Yefet, "Egypt's diaspora policy in the post-June 2013 era as a transnational mechanism of regime legitimation", *Globalizations*, (2023): 1-18.

⁶⁰ Jan Claudius Völkel, "Sidelined by design: Egypt's parliament in transition", *The Journal of North African Studies* 22, no. 4, (2017): 595-619.

menganalisis upaya transnasional melalui strategi kebijakan diaspora. Berbeda dengan Jan Claudius Völkel yang memberikan analisis tentang kontribusi parlemen Mesir dalam masa transisi ke pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi. Adapun yang menjadi pembeda dengan penelitian ini yakni topik penelitiannya yang mengangkat peran militer Mesir dalam kategori demokrasinya.

Adapun kajian pustaka yang menganalisis terkait relasi dengan negara lain dalam masa pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi, telah diteliti oleh Gamal M. Selim⁶¹, Jannis Julien Grimm⁶² dan Muhammad Khoirul Huda⁶³. Sedangkan yang menjadi pembeda dalam kajiannya yakni bahwa Gamal M. Selim hubungannya dengan Rusia dan Tiongkok, Jannis Julien Grimm relasinya dengan Arab Saudi dan Muhammad Khoirul Huda yang menganalisis hubungan bilateral Mesir dengan Israel, seangkan dalam penelitian ini membahas terkait perpolitikan Mesir pada masa pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi.

Selain pembahasn terkait dengan relasi Mesir dengan negara lain pada masa pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi, dalam kajian pustaka ini juga disebutkan beberapa penelitian yang membahas tentang kondisi demokrasi Mesir. Kondisi demokrasi mesir telah diteliti oleh Thomas carothers dan

⁶¹ Gamal M. Selim, "Egyptian foreign policy after the 2011 revolution: the dynamics of continuity and change", *British Journal of Middle Eastern Studies*, (2020): 1-22.

⁶² Jannis Julien Grimm, "Egypt is not for sale! Harnessing nationalism for alliance building in Egypt's Tiran and Sanafir island protests", *Mediterranean Politics* 24, no. 4, (2019): 443-466.

⁶³ Muhammad Khoirul Huda, "Analisis Peningkatan Hubungan Mesir – Israel Pada Periode Pertama Masa Pemerintahan Abdel Fattah Al-Sisi Tahun 2014-2018", *Dauliyah (Journal Of Islamic And International Affairs)* 3, no. 2, (2018): 285-300.

nathan j. Brown⁶⁴, Andrea Teti and Gennaro Gervasio⁶⁵, Bárbara Azaola Piazza⁶⁶, Maha Azam⁶⁷, dan Nadim Mirshak⁶⁸. Adapun yang menjadi pembeda yakni pada setiap pembahasannya yang mengkaji beragam ojek penelitian. Thomas carothers dan nathan j. Brown mengkaji dan menganalisis nasib transisi demokrasi yang terjadi pada transisi pemerintahan Morsi, berbeda dengan Maha Azam yang membahas wajah demokrasi baru yang dialami Mesir pada masa pemerintahan Morsi yang kemudian lebih diperdalam lagi oleh Andrea Teti and Gennaro Gervasio yang membahas tentang tantangan dan hambatan revolusi Mesir yang dialami pasca rezim Hosni Mubarak. Adapun Bárbara Azaola Piazza mengkaji dan menganalisis konsolidasi dalam berbagai elemen pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi yang kurang dirasakan oleh rakyat, adapun Nadim Mirshak kajian demokrasi terbaru pada masa Abdel Fatah Al-Sisi yang terjadi melalui perlawanan terselubung yang dikenal dengan istilah Gramscian, sedangkan penelitian ini membahas kondisi demokrasi Mesir dari berbagai aspek sosial seperti HAM, keterlibatan sipil dan beberapa aspek lainnya pada masa pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi.

⁶⁴ Thomas carothers dan Nathan J. Brown, “The Real danger”, 1-4.

⁶⁵ Andrea Teti and Gennaro Gervasio, “After Mubarak, Before Transition: The Challenges for Egypt’s Democratic Opposition”, *Interface: a journal for and about social movements* 4, no. 1, (2012): 102-112.

⁶⁶ Bárbara Azaola Piazza, “The Consolidation of Authoritarianism in al-Sisi’s Egypt”, *Geographical Overview, Middle East and Turkey*, (2018): 216-219.

⁶⁷ Maha Azzam, “Egypt’s Democratic Experiment: Challenges to a Positive Trajectory”, *Insight Turkey* 15, no. 2 (2013):157-170.

⁶⁸ Nadim Mirshak, “Rethinking resistance under authoritarianism: civil society and non-contentious forms of contestation in post-uprisings Egypt”, *Social Movement Studies* 18, no. 6, (2019): 702-719.

Adapun penelitian yang relevan dengan tema tentang demokratisasi Mesir telah dikaji oleh Samir & M Hamdan Basyar,⁶⁹ Maulana, Arief Alfian⁷⁰ dan Ahmad Sahide⁷¹. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan Samir & M Hamdan Basyar serta Maulana, Arief Alfian terdapat pada objek penelitian yang dibahas terkait dengan demokrasi Mesir. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ahmad Sahide meneliti tentang demokratisasi Tunisia, Mesir dan Suriah. Ketiga penelitian tersebut menjelaskan proses demokratisasi Mesir dan Tunisia serta Suriah yang telah terjadi, sedangkan penelitian ini membahas tentang kondisi demokrasi Mesir dari berbagai aspeknya pada masa pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi.

F. KERANGKA TEORI

Kerangka teori pada bagian ini menjelaskan secara singkat tentang teori yang akan digunakan pada penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini terdapat tiga pembahasan yang menjadi topik kajian yakni.

1. Konsep Pretorianisme dalam Sosiologi Politik

Para sosiolog modern seperti Marx dan Weber rata-rata menjadikan struktur sosio-politik masyarakat menjadi major fokusnya. Kecenderungannya dalam struktur kekuasaan dan relasi kuasa didasarkan pada *inequality* (ketidaksamaan) untuk mewujudkan tujuan. Terdapat dua strategi yang digunakan dalam menganalisis *inequality* tersebut. Pertama yakni teori kelas yang didominasi oleh dua aliran besar yakni *Marxist*

⁶⁹ Basyar, "Kegagalan Demokratisasi" 159-170..

⁷⁰ Maulana, Arief Alfian, Analisis Fluktuasi Demokratisasi di Mesir Pasca Lengsernya Hosni Mubarak, *thesis*, (Universitas Muhammadiyah Malang: 2022).

⁷¹ Sahide, *The Arab Spring*, 62.

Class Theori dan *Weberian Theory*. Kedua yakni teori elite yang meliputi empat aliran yakni *pluralist elite theory*, *elitist elite theori*, *democratic elitism*, dan *demo-elite perspective*.⁷²

Peran militer dalam pembahasan Mesir masuk pada penelitian ini termasuk kategori *military industrial complex* yang masuk dalam teori *power elite*. Teori ini merupakan yang paling sering digunakan dalam literatur sebagai gambaran teoritis mengenai koalisi yang terdiri dari kelompok-kelompok atau aktor-aktor kuat yang memiliki kepentingan ekonomi, kelembagaan atau politik yang sama dalam kelangsungan militer yang tinggi.⁷³ Hal ini merujuk pada aliansi antara pemerintah yakni pemimpin politik tertinggi, pemilik dan direktur perusahaan besar, dan panglima militer. Koalisi tiga kelompok elite ini yang akhirnya dikenal dengan istilah *military industrial complex*. Hal ini juga merujuk pada istilah militer dan para pengusaha yang memiliki peran penting dan memiliki pengaruh dalam dunia perpolitikan.

Jika diamati lebih jauh, yang sangat berperan dalam *power elite* adalah militer dan para pengusaha atau pemilik perusahaan. Perpaduan keduanya termasuk sebagai "*military capitalism*". Meningkatnya tingkat pembiayaan pertahanan negara serta membengkaknya anggaran perang sebagai keamanan negara tentu terjadi karena adanya ambisi politik. Lebih dari itu, juga karena adanya tekanan dari para pengusaha untuk

⁷² Ahmad Imam Mawardi, "Charles Wright Mills dan Teori Power Elite: Membaca Konteks dan Pemetaan Teori Sosiologi Politik tentang Kelas Elite Kekuasaan", *Jurnal; Sosiologi Pendidikan Humanis* 4, no.2, (2019): 76.

⁷³ Alex Mintz, "The military-industrial complex: The Israeli case", *Journal of Strategic Studies* 6, no. 3, (1983): 103-127.

mendapatkan keuntungan bisnis dari kondisi yang ada. Pengusaha dan militer kemudian memiliki deal kelas atas untuk membuat kebijakan dalam meraih keuntungan bersama. Penjelasan koalisi seperti ini yang kemudian melahirkan istilah *The Military Industrial Complex*, sebuah istilah yang pertama kali disebutkan oleh Presiden Dwight Eisenhower pada saat lengser dari kursi kepresidenannya, tetapi kemudian dilabelkan kepada teori power elite Mills.⁷⁴

Sosiologi politik membahas terkait dengan konsep praetorianisme yang merupakan pandangan Perlmutter. Dijelaskan bahwa konsep praetorianisme sebagai militer yang memiliki peran dan kedudukan dalam kekuasaan politik otonom dalam rakyat.⁷⁵ El Shimmy menyebutkan bahwa Perlmutter⁷⁶ juga menjelaskan terkait jenis militer di masa modern ini yang terbagi menjadi tiga yakni prajurit profesional, prajurit pretorian dan prajurit revolusioner. Prajurit pretorian dalam pandangan El Shimmy menunjukkan bahwa aktor politik utama yang akan mengelola, menumbangkan bahkan hingga mengontrol transisi politik untuk memastikan bahwa pemerintahan tidak dipegang oleh warga sipil.⁷⁷

Perlmutter membagi konsep praetorian menjadi tiga jenis yakni pertama, praetorianisme modern otokrasi yang merupakan bentuk tirani

⁷⁴ Ahmad Imam Mawardi, "Charles Wright Mills dan Teori Power Elite: Membaca Konteks dan Pemetaan Teori Sosiologi Politik tentang Kelas Elite Kekuasaan", *Jurnal; Sosiologi Pendidikan Humanis* 4, no. 2, (2019): 79-80.

⁷⁵ Amos Perlmutter, *Militer dan Politik*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000). 71.

⁷⁶ El-Shimmy, *A Model of Praetorian States*. Cambridge: Middle East Initiative Working Paper: Harvard Kennedy School, (Cambridge: Belfer Center for Science and International Affairs Harvard Kennedy School: 2016).

⁷⁷ *ibid*, 20.

militer yang sederhana, pemerintahan oleh satu orang. kedua, pretorianisme modern oligarki, yang merupakan bentuk pemerintahan yang dikuasai oleh sekelompok orang. Ketiga yakni praetorian modern otoriter yakni bentuk pemerintahan yang ditandai oleh fusionis militer sipil. Adapun berdasarkan perannya, praetorian memiliki dua tipe yakni tipe arbiter dan tipe penguasa.

Praetorian dengan tipe arbiter cenderung berorientasi pada profesional yang tidak memiliki organisasi politik independen serta kurang tertarik untuk membuat ideologi politik. Tentara praetorian tipe arbiter menjaga profesionalismenya dengan pelatihan profesional, persaingan ketrampilan serta pelestarian integritas kolektif profesional atau korporatarisme. Sedangkan tipe penguasa memiliki organisasi politik yang independen serta memiliki ideologi politik yang koheren dan rumit. Tentara praetorian dengan tipe penguasa meskipun tidak meninggalkan profesionalismenya, namun tetap menduduki pertimbangan politik. Dalam tipe ini, lebih memaksimalkan kekuasaan militer dengan tujuan membangun kendali militer langsung dan parlemen.⁷⁸

Tentara praetorian tidak menghasilkan ideologi politik. Namun, motif untuk berkuasa ataupun modus politik yang dipengaruhi oleh ideologi sipil atau politisi. Kedua tindakan ini dipengaruhi oleh struktur internal tentara dan sejauh mana tentara mengembangkan organisasi politik yang dapat diidentifikasi, interaksi tentara dengan organisasi sipil, dan

⁷⁸ Perlmutter, Egypt: The Praetorian“, 78

jenis tatanan politik yang ingin dihilangkan oleh tentara dan jenis penggantinya. Adapun praetorianisme ini dapat muncul dari kondisi husus dalam institusi militer seperti seringnya kudeta militer, kudeta balasan dan intervensi, pembunuhan saudara yang terjadi dalam korps perwira, kurangnya tradisi profesional militer dan tentu tradisi praetorian yang sudah lama berkuasa.⁷⁹

2. Demokrasi

Beragam teori demokrasi dengan variasinya merupakan sebuah pengertian yang diberikan dengan konsep-konsep yang berbeda, namun bahwa semua variasi dari teori demokrasi ini membangun sebuah sistem bernegara untuk menuju kondisi yang lebih baik. Hal ini selaras dengan penuturan Jean Jaques Rousseau yang mengungkapkan bahwa demokrasi merupakan sebuah proses yang harus dijalani oleh sebuah negara untuk memperoleh kesejahteraan.⁸⁰ Pandangan Hans Kelsen dalam mendefinisikan negara demokrasi yakni memiliki sarana yang luas terhadap beragam pendapat umum. Pendapat umum ini akan muncul jika adanya jaminan terhadap kebebasan intelektual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan beragama.⁸¹

Global States of Democracy Indices merupakan indikator dalam menggambarkan tren demokrasi di tingkat nasional, regional, dan global dalam 29 aspek demokrasi selama tahun 1975–2022, yang diperbarui

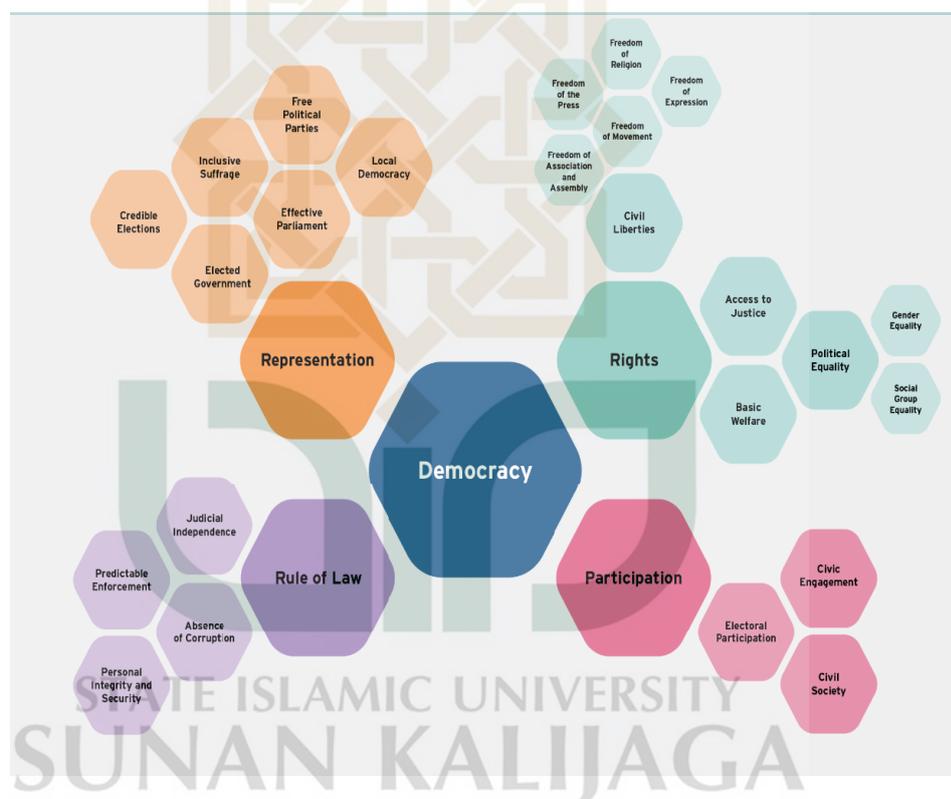
⁷⁹ *ibid*, 82.

⁸⁰ Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Visimedia, 2007), 77.

⁸¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan pertama, (Bandung: Penerbit Nuansa dan penerbit Nusamedia, 2006).

setiap tahun. Indeks GSoD dikumpulkan dari 157 indikator individual, diambil dari 20 sumber data berbeda, dan kumpulan data Varietas Demokrasi merupakan yang terbesar. Semua penilaian berkisar dari 0 hingga 1, dengan 0 mewakili pencapaian terendah di seluruh sampel dan 1 mewakili pencapaian tertinggi.⁸²

Gambar 1 Pola Global States of Democracy Indices



Gambar Aspek dalam Global States of Democracy Indices

Indeks demokrasi yang dikeluarkan oleh Economist Intelligence Unit⁸³ didasarkan pada lima kategori: proses pemilu dan kemajemukan; kebebasan sipil; berfungsinya pemerintahan; partisipasi politik; dan budaya politik. Tiap kategori diberi peringkat dalam skala 0 hingga 10, dan

⁸² Kelley Friel, "Global State", 3-9.

⁸³ Butter David, "Democracy Index 2013, Democracy in Limbo", *A Report The Economist Intelligence Unit*, 2013, www.eiu.com.

indeks demokrasi secara keseluruhan merupakan rata-rata sederhana dari lima indeks kategori. Indeks kategori didasarkan pada jumlah skor indikator dalam kategori tersebut, dikonversi ke skala 0 hingga 10. Penyesuaian terhadap skor kategori dilakukan jika suatu negara tidak mendapatkan nilai 1 pada bidang-bidang penting demokrasi berikut ini:

- a. Apakah pemilu nasional berlangsung bebas dan adil
- b. keamanan pemilih
- c. pengaruh kekuatan asing terhadap pemerintah
- d. kemampuan pegawai negeri dalam melaksanakan kebijakan

Jika skor untuk tiga pertanyaan pertama adalah 0 (atau 0,5), satu poin (0,5 poin) dikurangkan dari indeks dalam kategori yang relevan (baik proses pemilu dan pluralisme atau fungsi pemerintahan). Jika skor 4 adalah 0, satu poin dikurangkan dari berfungsinya indeks kategori pemerintah. Nilai indeks digunakan untuk menempatkan negara-negara dalam salah satu dari empat jenis rezim:

- a. Demokrasi penuh--skor 8-10
- b. Demokrasi yang cacat – skor 6 hingga 7,9
- c. Rezim hibrida—skor 4 hingga 5,9
- d. Rezim otoriter--skornya di bawah 4

Kategori setiap demokrasi memiliki kriteria tersendiri. Adapun demokrasi penuh diartikan sebagai negara-negara yang tidak hanya menghormati kebebasan dasar politik dan kebebasan sipil, namun hal ini juga cenderung didukung oleh budaya politik yang kondusif bagi

berkembangnya demokrasi, fungsi pemerintahan cukup memuaskan, media bersifat independen dan beragam, adanya sistem *checks and balances* yang efektif, peradilan bersifat independen dan keputusan pengadilan ditegakkan serta hanya ada sedikit masalah dalam berfungsinya negara demokrasi.

Negara-negara dalam kategori demokrasi yang cacat menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil, dan bahkan jika memang ada masalah (seperti pelanggaran terhadap kebebasan media), kebebasan sipil dasar akan dihormati. Namun, terdapat kelemahan signifikan dalam aspek demokrasi lainnya, termasuk permasalahan dalam pemerintahan, budaya politik yang belum berkembang, dan rendahnya tingkat partisipasi politik.

Pemilu dalam negara-negara rezim hibrida mempunyai banyak penyimpangan yang seringkali menghalangi keduanya bebas dan adil. Tekanan pemerintah terhadap partai dan kandidat oposisi mungkin merupakan hal biasa. Kelemahan serius lebih banyak terjadi dibandingkan negara demokrasi yang cacat, yaitu dalam budaya politik, fungsi pemerintahan dan partisipasi politik. Korupsi cenderung merajalela dan supremasi hukum lemah, masyarakat sipil lemah, biasanya terjadi pelecehan dan tekanan terhadap jurnalis, dan sistem peradilan tidak independen.

Adapun di negara-negara rezim otoriter, pluralisme politik negara tidak ada atau sangat dibatasi banyak negara dalam kategori ini merupakan

negara diktator. Beberapa lembaga formal demokrasi mungkin ada namun substansinya tidak banyak. Pemilu, jika memang terjadi, tidaklah bebas dan adil. Ada pengabaian terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran kebebasan sipil. Media pada umumnya adalah milik negara atau dikendalikan oleh kelompok-kelompok yang terkait dengan rezim yang berkuasa. Ada penindasan terhadap kritik terhadap pemerintah dan sensor yang meluas. Tidak ada peradilan yang independen.

Mesir merupakan negara dengan historis sistem pemerintahan kerajaan.⁸⁴ Proses untuk menuju negara demokrasi yang menonjol yakni proses demokratisasi Mesir yang merupakan proses transisi dari sistem otokratis menuju sistem demokratis.⁸⁵ Hal tersebut disebutkan oleh Georg Sorensen bahwa negara dengan tahap menuju demokrasi rezim akan dihadapkan dengan sistem yang terbatas namun lebih demokratis dari rezim sebelumnya. Adapun dalam penelitian ini, teori demokrasi yang digunakan mengutip dari buku *The Arab Spring* terkait dengan konsolidasi dan transisi menuju demokrasi.⁸⁶

Teori demokrasi dengan percampuran dari militer dijelaskan oleh Philip Huntington yang merupakan seorang ilmuwan politik berkebangsaan Amerika. Fokusnya pada isu-isu peradaban, demokrasi dan hubungan sipil-militer diartikan dengan memberikan definisi sebuah demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang berdasarkan wewenang bagi

⁸⁴ Basyar, "Kegagalan Demokratisasi di Mesir Pasca-Arab Spring (The Failure of Democratization in Egypt Post Arab Spring)", *Jurnal Penelitian Politik* 18, no. 2 (2021).

⁸⁵ Sahide, *The Arab Spring*, 34.

⁸⁶ *ibid*, 37.

pemerintah, tujuan yang dilayani oleh pemerintah serta prosedur untuk membentuk pemerintahan.⁸⁷

Dr. Dietrich Genschel kemudian memberikan penjelasan lebih rinci terkait dengan prinsip militer dalam sebuah negara demoratis.

- a. Militer merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif dalam tatakelola pemerintahan. Oleh karena hal tersebut, militer merupakan elemen yang memisahkan kekuasaan dalam sistem politik yang demokratis, selain adanya elemen yudikatif dan legislatif
- b. Militer berada dalam kepemimpinan politik yang telah disahkan secara demokratis. Jabatan yang dipegang oleh menteri pertahanan berasal dari sipil
- c. Militer mengikuti pedoman politik yang digunakan
- d. Militer patuh dan tunduk pada hukum
- e. Militer dibatasi oleh tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh konstitusi, secara reguler menjaga keamanan eksternal negara serta menjaga pertahanan negara. Militer dapat dilibatkan dalam menjaga keamanan internal negara dibawah komando polisi.
- f. Militer bersifat netral dalam politik
- g. Militer tidak dibenarkan memiliki akses memperoleh dukungan keuangan di luar anggaran pendapatan dan belanja negara
- h. Militer dikendalikan oleh parlemen, kepemimpinan politik, kekuasaan kehakiman dan rakyat sipil secara umum

⁸⁷ Tim KontraS, *Politik Militer dalam Transisi Demokrasi Indonesia*, (Jakarta: KontraS, 2005).

- i. Militer memiliki tanggungjawab yang jelas berdasarkan keahlian profesional yang dimilikinya dan dengan hal tersebut, militer memiliki harkat dan martabat.⁸⁸

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif yang memperdalam informasi serta menganalisis penelitian sejenis.⁸⁹ Strategi studi kasus deskriptif⁹⁰ dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis secara mendalam terkait kondisi perpolitikan Mesir hingga kondisi demokrasi Mesir masa pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi. Adapun fokus kajian dalam penelitian ini yakni masa pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi yang telah terlaksana, dimulai dari tahun 2013 hingga 2022. Kajian tersebut dianalisis secara mendalam pada kajian kondisi perpolitikan dan demokrasi Mesir yang diperankan oleh militer atak konsep praetorian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kondisi politik dan kondisi demokrasi rezim otoriter Mesir yang terjadi pada masa pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi. Kondisi perpolitikan Mesir nampaknya tidak bisa dipisahkan dari kondisi sejarah revolusinya yang telah berlangsung. Hasil dari penelitian dan kajian analisis yang ditemukan dalam penelitian ini sebagai hasil yang memiliki nilai *novelty*

⁸⁸ *ibid*, 16-22.

⁸⁹ Khatibah, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra* 5, no. 1 (2011): 4.

⁹⁰ Pamela Baxter and Susan Jack, "Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers", *The Qualitative Report* 13, no. 4 (2008).

tentang kondisi perpolitikan Mesir beserta kondisi demokrasi negara Mesir yang termasuk dalam rezim otoriter pada masa pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi. Kajian ini juga memberikan gambaran eksploratif yang berasal dari hasil analisis dengan berbagai teori indeks demokrasi serta teori onsep praetorianisme yang digunakan, sehingga tidak hanya menyajikan kondisi negara Mesir secara deskriptif, namun juga memberikan analisis mendalam terkait dengan kondisi demokrasi Mesir yang terjadi pada masa pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sebuah batasan penelitian berupa hal yang dijadikan untuk pelekat variabel penelitian.⁹¹ Subjek penelitian dalam penelitian ini yakni Abdel Fatah Al-Sisi sebagai pemimpin negara atau presiden Mesir yang menjabat mulai tahun 2013 hingga sekarang. Penelitian ini menggali peran militer Mesir dalam kondisi perpolitikan dan demokrasi Mesir melalui studi pustaka dengan penggalian data terhadap kajian-kajian pustaka. Studi pustaka yang digali diperoleh dari beragam karya tulis ilmiah yang telah dipublikasi jurnal secara online, selain artikel jurnal tersebut dokumen-dokumen kebijakan Mesir dan juga beragam video ataupun gambar yang memiliki pesan tentang kesistensi militer Mesir dalam masa kepemimpinan Abdel Fatah Al-Sisi. Studi pustaka ini

⁹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2016).

mendapatkan data terkait dengan kondisi perpolitikan, kebijakan serta kondisi demokrasi negara Mesir pada masa pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dikaji dalam penelitian ini merupakan sebuah nilai yang melekat serta memiliki variasi tertentu.⁹² Objek penelitian ini juga merupakan hal yang menjadi titik perhatian berupa substansi atau materi yang diteliti atau dipecahkan permasalahannya menggunakan teori-teori yang akan digunakan.⁹³ Adapun objek penelitian dalam penelitian ini yakni kondisi perpolitikan Mesir pada masa Abdel Fatah Al-Sisi serta kondisi demokrasi Mesir pada pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini memberikan gambaran beragam fenomena dan intervensi yang terjadi dalam perpolitikan Mesir pada masa dilakukan dengan mengumpulkan beragam informasi yang diperoleh melalui studi pustaka yang membahas terkait kebijakan Abdel Fatah Al-Sisi pada kisaran tahun 2013 hingga tahun 2022. Hal ini dikarenakan masa jabatan Abdel Fatah Al-Sisi dimulai dari tahun 2013 hingga saat ini, akan tetapi di tahun 2023 ini merupakan masa yang masih berlangsung sehingga kebijakan yang dihasilkan kurang bisa

⁹² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

⁹³ Moleong, J.L. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).

dianalisis dengan teknik dokumentasi serta hasilnya yang belum terdokumentasi.

Teknik dokumentasi⁹⁴ ini dilakukan dengan mengambil beragam data penelitian yang berkaitan dengan kondisi perpolitikan dan demokrasi Mesir pada masa Abdel Fatah Al-Sisi. Data yang digali dari teknik dokumentasi ini berupa data narasi maupun gambar terkait dengan kondisi perpolitikan Mesir, kebijakan Abdel Fatah Al-Sisi serta kondisi demokrasi Mesir. Penggalan data ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara rinci terkait dengan kondisi perpolitikan Mesir masa Abdel Fatah Al-Sisi sesuai dengan urutan waktu serta rincian kejadian dalam negara Mesir pada masa Abdel Fatah Al-Sisi. Selain itu, teknik dokumentasi ini juga dilakukan untuk mendapatkan data terkait dengan beragam kebijakan Abdel Fatah Al-Sisi yang telah diterapkan dan juga dampaknya terhadap demokrasi Mesir.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dikategorikan dalam studi kasus deskriptif yang memberikan gambaran terhadap politik Mesir yang terjadi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menginduk pada analisis studi kasus yang diungkapkan oleh Yin⁹⁵ yakni penjadohan pola, pembuatan eksplanasi dan analisis deret waktu.

⁹⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: untuk ilmu-ilmu sosial*, (Yogyakarta:Salemba Empat, 2011).

⁹⁵ Robert K. Yin, *Case Study Research Design and Methods*, (Washington: COSMOS Corporation, 1989),140-150.

Penjodohan pola dilakukan dengan memilih data yang sejenis sesuai dengan pola pembahasan yang ada. Setelah pola terbentuk dari data yang telah dipilah, langkah selanjutnya yakni pembuatan eksplanasi melalui pemaparan proses peristiwa yang terjadi dalam kondisi perpolitikan Mesir dan kondisi demokrasi Mesir. Setelah langkah eksplanasi, yakni analisis deret waktu yang disusun secara sistematis sesuai dengan deret waktunya.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistem penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bagian : pendahuluan, landasan teori, hasil penelitian, dan penutup.

Bab I berisi Pendahuluan yang menjelaskan tentang : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Landasan Teori, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II membahas kondisi sosial politik Mesir yang membahas kondisi demografi, sosial dan politik Mesir sebelum terjadinya revolusi Mesir atau Arab Spring Mesir.

Bab III berisi pembahasan demokrasi Mesir dilihat dari global indeks demokrasi Mesir disertai dengan analisis setiap item dari aspek atau indikator yang ada dalam global indeks demokrasi.

Bab IV berisi hasil analisis tentang relasi militer dan negara Mesir pada pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi.

Bab V berisi Penutup dalam bab terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan, saran, kata penutup dan pada bagian akhir terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat keterangan penelitian dan daftar riwayat hidup



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut hasil penelitian yang telah paparkan, dapat ditarik kesimpulan terkait dengan beberapa rumusan masalah yang diajukan, diantaranya yakni:

1. Kondisi perpolitikan Mesir pada masa Abdel Fatah Al-Sisi

Kondisi perpolitikan yang didominasi oleh kalangan militer pada masa Abdel Fatah Al-Sisi memberikan kekuasaan penuh kepada militer untuk mengatur Mesir. Dalam kekuasaan Abdel Fatah Al-Sisi, Mesir mengeluarkan berbagai kebijakan yang mempersempit ruang gerak para masyarakat Mesir. Hal ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti aspek sosial, ekonomi, dan politik. Semua kebijakan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi ditujukan untuk menutup celah para pemberontak pemerintahan. Salah satu kebijakan yang menjadi inti dari beberapa kebijakan Al Sisi yakni Kebijakan nasionalisasi. Kebijakan nasionalisasi menjadi kebijakan yang diterapkan dalam masa pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi untuk menetralsir modal sosial yang diperoleh dari penyediaan layanan asosiasi Islam, dan manfaat yang dihasilkannya bagi lawan pemerintah, yakni Ikhwanul Muslimin. Kebijakan ini menjadi fokus dari beberapa kebijakan yang ada. Fokus utama kebijakan nasionalisasi yakni menetralsir penantang politik daripada pengambilalihan besar-besaran

sektor sosial Islam. Hal tersebut dikarenakan sistem pemerintahan otoriter sehingga menutup celah untuk para penantang politik.

2. Kondisi demokrasi di Negara Mesir pada masa pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi

Masa pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi yang berlangsung dari tahun 2013 hingga sekarang masih berada pada sistem pemerintahan otoriter. Hal tersebut terindikasikan melalui Global States of Democracy Indices. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap masa pemerintahan Abdel Fatah Al-Sisi dari tahun 2013 hingga tahun 2022, skor yang dimiliki Mesir berada pada kisaran dibawah 4. Sedangkan menurut Nilai indeks yang digunakan dalam indeks demokrasi, skor 4 merupakan skor yang paling minimum untuk kategori rezim otoriter. Kondisi ini juga terlihat dalam fenomena pelanggaran HAM yang sangat marak terjadi. Dalam setiap tahunj Mesir memiliki riwayat pelanggaran HAM baik dalam bentuk penangkapan secara paksa, pembunuhan yang dilakukan oleh polisi Mesir menjadi tanda bagi lemahnya perlindungan dan lemahnya penegakan hukum yang ada di Mesir.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh berbagai pihak terkait dengan demokrasi Mesir yakni perlunya memperjelas kembali terkait dengan tugas pokok serta fungsi militer dalam kedudukan perpolitikan kenegaraan Mesir. Hal ini diupayakan dengan

tujuan untuk mencegah adanya tumpang tindih peran militer serta fungsi ganda pada militer.

Selain memperjelas tugas fungsi dan fungsi militer, juga diperlukannya kebijakan dalam memberikan kesempatan kepada para masyarakat sipil untuk turut berkontribusi dalam perpolitikan Mesir dengan memperbesar prosentase partisipasi masyarakat sipil dalam dunia perpolitikan Mesir. Hal ini sebagai pertimbangan kebijakan yang memihak pada kepentingan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulrasheed Abdulyakeen, "Democracy and Development in Africa: Contending Issues and Prospects for The 21st Centuries", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 4, no. 1, 2023.

Abubakr Al Shamahi, "Egypt's military dominates 10 years after revolution", *Aljazeera*, 26 Januari 2021, <https://www.aljazeera.com/news/2021/1/26/egypt-revolution-anniversary>.

Achmad Siddik Thoha, "Belajar dari Mursi, Presiden Baru Mesir", *kompasiana*, 25 Juni 2015, <https://www.kompasiana.com/achmadsiddikthoha/55118fc4a33311ae4eba7ec5/belajar-dari-mursi-presiden-baru-mesir?page=all#section2>.

Adam Zeidan, "The Editors of Encyclopedia Britannica, Abdel Fattah Al-Sisi President of Egypt", *Britannica*, 3 October 2023, <https://www.britannica.com/biography/Abdel-Fattah-al-Sisi>.

Afini Nurdina Utami & Syaiful Anam, "Dominasi Militer dalam Politik dan Pemerintahan di Mesir: Kegagalan Demokratisasi di Mesir pada Kudeta 2013", *Review of International Relations* 4 no. 2, 2022.

Afini Nurdina Utami & Syaiful Anam, "Dominasi Militer dalam Politik dan Pemerintahan di Mesir: Kegagalan Demokratisasi di Mesir pada Kudeta 2013", *Review of International Relations* 4, no. 2, 2022.

Agia Khumaesi & Endah Hapsari, “Ikhwanul Muslimin Dominasi Parlemen Baru Mesir,” *Republika Online*, 24 Juni 2013, <https://internasional.republika.co.id/berita/ly890c/ikhwanul-muslimin-dominasi-parlemen-baru-mesir>.

Ahmad Imam Mawardi, “Charles Wright Mills dan Teori Power Elite: Membaca Konteks dan Pemetaan Teori Sosiologi Politik tentang Kelas Elite Kekuasaan”, *Jurnal; Sosiologi Pendidikan Humanis* 4, no.2, 2019.

Ahmad Sahide, *Gejolak Politik Timur Tengah (Dinamika, Konflik dan Harapan)*, Yogyakarta: The Phinisi Press, 2017.

Ahmad Sahide, *The Arab Spring: Tantangan dan Harapan Demokratisasi*, Jakarta: Kompas, 2019.

Alex Mintz, “The military-industrial complex: The Israeli case”, *Journal of Strategic Studies* 6, no. 3, 1983.

Amde Tantawi, “Egypt sentences participant in the 2019 anti-government protests, Monthly Event Reports”, *Global State of Democracy initiative*, January 2023.

Amin Saikal, “Authoritarianism, revolution and democracy: Egypt and beyond”, *Australian Journal of International Affairs* 65, no. 5, 2011.

Amnesty, “Egypt: Rampant torture, arbitrary arrests and detentions signal catastrophic decline in human rights one year after ousting of Mursi”, 3 Juli 2014, www.amnesty.org.

Amos Perlmutter, *Militer dan Politik*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.

Amri Muslih, Hurriyah, “Aktor Politik dan Gagalnya Transisi Demokrasi Mesir Tahun 2011-2013”, *Jurnal Politik* 2, no. 1, 2016.

Andrea Teti and Gennaro Gervasio, “After Mubarak, Before Transition: The Challenges for Egypt’s Democratic Opposition”, *Interface: a journal for and about social movements* 4, no. 1, 2012.

AP, AFP, “Pemimpin Ikhwanul Muslimin divonis penjara seumurn hidup”, *dw*, 9 April 2021, www.dw.com.

Arshad, “Understanding the Praetorian Rule of Fatah al-Sisi in Egypt”, *PanAfrican Journal of Governance and Development* 2 no. 2 2021.

Bárbara Azaola Piazza, “The Consolidation of Authoritarianism in al-Sisi’s Egypt”, *Geographical Overview, Middle East and Turkey*, 2018.

Bintang Mei Syiam Astri Ilmania, “Pemerintah Otoriter Mesir diBawah Presiden Abdel Fattah Al-Sisi Pasca Kudeta Militer Tahun 2013 (The Authoritarian Government of Egypt under President Abdel Fattah Al-Sisi, Administration after Military Coup 2013)”, *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 2017.

Bosmat Yefet dan Limor Lavie, “Legitimation in post-revolutionary Egypt: Al-Sisi and the renewal of authoritarianism,” *Wiley Article, Digest of Middle East Studies* 1, no. 16, 2021.

Boureau, "Egypt 2022 Human Right Report, U.S. Embassy in Egypt", US Departement of State, 2022, eg.usembassy.gov.

Butter David, "Democracy Index 2013, Democracy in Limbo", A Report The Economist Intellegence Unit, 2013, www.eiu.com.

David Ottoway, "Hosni Mubarak's Dramatic Rise and Fall from Power", Wilson Center, 25 Februari 2020, <https://www.wilsoncenter.org/article/hosni-mubaraks-dramatic-rise-and-fall-power>.

Denny Armandanu, "Mesir Vonis Mati 183 pendukung Ikhwanul Muslimin", CNN Internasional, 3 Februari 2015, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150203091645-120-29200/mesir-vonis-mati-183-pendukung-ikhwanul-muslimin>.

Dr Zeinab Abul-Magd, *The military*, Adelphi Series: 2015.

Ekip, "Jaksa Mesir bebaskan putri Yusuf al Qardhawi setelah 4 tahun di tahan", AA, 01 januari 2022, www.aa.com.tr.

El Baradei, "Egyptian woman (2019): Politics of Evidence Based Policy Making: Reporting on SDG 16 in Egypt", *International Journal of Public Administration*, 2020.

El-Shimmy, *A Model of Praetorian States*. Cambridge: Middle East Initiative Working Paper: Harvard Kennedy School, (Cambridge: Belfer Center for Science and International Affairs).

Faruq Sultan, "Mursi Menangkan Pilpres", Kompas, 24 Juni 2012, kopmpas, <https://nasional.kompas.com/read/2012/06/24/2202526/index.html>.

Fuji Rahmadi P., "Dinasti Fatimiyah Di Mesir (Analisa Pertumbuhan, perkembangan dan pengaruhnya)", Al Hadi II, no. 2, 2017.

Gamal M. Selim, "Egyptian foreign policy after the 2011 revolution: the dynamics of continuity and change", British Journal of Middle Eastern Studies, 2020.

Hannah Allam, "Egypt Insider: Mubarak's fall was years in the maing", Mc Clatchydc, 4 April 2011, <https://www.mcclatchydc.com/news/nation-world/world/article24611869.html>.

Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Cetakan pertama, Bandung: Penerbit Nuansa dan penerbit Nusamedia, 2006.

Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif: untuk ilmu-ilmu sosial, Yogyakarta:Salemba Empat, 2011.

Hebatalla Taha, "Militarisation and security challenges in Egypt", Adelphi Series 55, no. 453-454, 2015.

Hicham Bou Nassif , "Coups and nascent democracies: the military and Egypt's failed consolidation", Democratization, 2016.

Ismah Tita Ruslin, 'Memetakan Konflik Di Timur Tengah (Tinjauan Geografi Politik)', Jurnal Politik Profetik 1, no. 1, 2013.

Jan Claudius Völkel, “Sidelined by design: Egypt’s parliament in transition”, *The Journal of North African Studies* 22, no. 4, 2017.

Jannis Julien Grimm, “Egypt is not for sale! Harnessing nationalism for alliance building in Egypt’s Tiran and Sanafir island protests”, *Mediterranean Politics* 24, no. 4, 2019.

Jannis Julien Grimm, “Egypt is not for sale! Harnessing nationalism for alliance building in Egypt’s Tiran and Sanafir island protests”, *Mediterranean Politics* 24, no. 4, 2019.

Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, Cetakan Pertama, Jakarta: Visimedia, 2007.

Johan Franzén & Alexander Brown, *Egypt’s Praetorian Guards To what extent did General Abdel Fattah alSisi’s discourse undermine Egypt’s first democratically elected president?*, *thesis*, School of Political, Social and International Studies, University of East Anglia, 2014.

John L. Exposito dan Joohn O Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim*, Bandung: Mizan, 1999.

Justin A. Hoyle, “To govern, or not to govern? Opportunity and post-coup military behaviour in Egypt 2011–2014”, *Democratization* 26, no. 6, 2019.

Kelley Friel, “Global State of Democracy Indices, International IDEA, Institute for democracy and electoral assistance” 12 September 2023, <https://www.idea.int/data-tools/tools/global-state-democracy-indices>.

Khatibah, “Penelitian Kepustakaan”, Jurnal Iqra 5, no. 1, 2011.

Laila El Baradei, “Egyptianwoman (2019): Politics of Evidence Based Policy Making: Reporting on SDG 16 in Egypt”, International Journal of Public Administration 43, no. 5, 2019.

Lasheen Ibrahim, "Menang Telak Pemilu, Presiden Sisi kembali Pimpin Mesir", CNN Indonesia, April 2018, <https://www.cnnindonesia.com>.

Lintar Satria, “Mesir Tetap akan hukum Mati 12 Tokoh Ikhwal Muslimin”, Internasional. Republika, 15 Juni 2021, <https://internasional.republika.co.id/berita/quq89r382/mesir-tetap-akan-hukum-mati-12-tokoh-ikhwanul-muslimin>.

Lucia Ardovini & Simon Mabon, “Egypt’s unbreakable curse: Tracing the State of Exception from Mubarak to Al-Sisi”, Mediterranean Politics 25, no. 4, 2020.

Lucia Ardovini, “Egypt’s unbreakable curse: Tracing the State of Exception from Mubarak to Al-Sisi”, Mediterranean politics 25, no. 4, 2020.

M.NW, “Freedom in the world 2019”, freedom house, 2 November 2019, <https://freedomhouse.org/country/egypt/freedom-world/2019>.

Maha Azzam, "Egypt's Democratic Experiment: Challenges to a Positive Trajectory", *Insight Turkey* 15, no. 2, 2013.

Masooda Bano & Hanane Benadi, "Regulating religious authority for political gains: al-Sisi's manipulation of al-Azhar in Egypt", *Third World Quarterly*, 2017.

Masoud Rezaei, Egypt and "Democracy Dilemma", *African Journal of Political Science and International Relations* 9, no. 6, 2015.

Maulana, Arief Alfian, Analisis Fluktuasi Demokratisasi di Mesir Pasca Lengsernya Hosni Mubarak, *thesis*, Universitas Muhammadiyah Malang: 2022.

Mohammad Yusuf Setyawan, "Identitas Budaya Dan Bahasa Arab (Kajian Budaya Arab)", *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 9, no. 2, 2021.

Moleong, J.L. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Muh. Haris Zubaidillah, "Sejarah Kemajuan dan Kemunduran Dinasti Mamalik Mesir", 2018, DOI:10.31219/osf.io/6zuky.

Muhammad Khoirul Huda, "Analisis Peningkatan Hubungan Mesir – Israel Pada Periode Pertama Masa Pemerintahan Abdel Fattah Al-Sisi Tahun 2014-2018", *Dauliyah (Journal Of Islamic And International Affairs)* 3, no. 2, 2018.

Muhammad S.A, “Presiden Mursi Ungkap Kronologi Kudeta atas Dirinya”, Radar Pekanbaru, 18 Desember 2013, <https://radarpekanbaru.com/news/detail/341/presiden-mursi-ungkap-kronologi-kudeta-atas-dirinya-..>

Mundzirin Yusuf, “Peradaban Dinasti Mamluk di Mesir”, *Thaqafiyat* 16, no. 2, 2015.

Nadim Mirshak, “Rethinking resistance under authoritarianism: civil society and non-contentious forms of contestation in post-uprisings Egypt”, *Social Movement Studies*, 2019.

Neil Russell (2023) “Reconstituted authoritarianism: Islam, service provision and the state in al-Sisi’s Egypt”, *Democratization* 30, no. 1, 2021.

Nuruddin, “Ide Pembaharuan Napoleon Bonaparte dan Tahtawi di Mesir”, *Al Ma’rifah* 12, no. 1, 2015.

Pamela Baxter and Susan Jack, “Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers”, *The Qualitative Report* 13, no. 4, 2008.

Paul S. Rowe, “The church and the street: Copts and interest representation from Mubarak to Sisi”, *Religion, State & Society* 48, no. 5, 2020.

Radhitya An, “Militer Mesir berhasil tangkap pentolan ikhwanul muslimin”, *viva*, 28 Agustus 2020, viva.co.id.

Robert K. Yin, *Case Study Research Design and Methods*, Washington: COSMOS Corporation, 1989.

RTN, RTR, *Rekonsiliasi di Mesir tanpa Ikhwanul Muslimin?*, dw, 29 Juli 2022, www.dw.com.

Samir, M. Hamdan Basyar, “Kegagalan Demokratisasi di Mesir Pasca-Arab Spring (The Failure of Democratization in Egypt Post Arab Spring)”, *Jurnal Penelitian Politik* 18, no. 2, 2021.

Seema Shah, “National dialogue initiated amidst opposition crackdown dalam Monthly Event Reports”, *Global State of Democracy initiative*, May 2023, <https://www.idea.int/g sod/2023/>.

Siti Zubaidah, *Sejarah Peradaban Islam*, Medan; Perdana Publishing, 2016.

Stephen Roll and Luca Mische, “Egypt Engulfed by Militarism, MPC’s. Middle East and Turkey”, *Geographical Overview*, 2019.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta. 2016.

Theofilus Richard, “Dituduh Berencana gulingkan pemerintah Mesir, 8 Orang ditahan, diyakini anggota ikhwanul muslimin”, *Tribun Jabar*, 26 Juni 2019, <https://jabar.tribunnews.com>, pada 26 Juni 2019.

Thomas Carothers dan Nathan J. Brown, The Real danger for Egyptian democracy, Carnegie Endowment for International Peace.12 November 2012, <https://carnegieendowment.org/2012/11/12/real-danger-for-egyptian-democracy-pub-49940>.

Tim KontraS, Politik Militer dalam Transisi Demokrasi Indonesia, Jakarta: 2005.

Virginia Sherin & Hardi Alunaza, “The Role of President Abdel Fattah Al-Sisi's Government for the Development of Egypt's Post-Revolutionary Economic Reforms in 2011”, Journal CMES 14, no. 2, 2021.

Walter Armbrust , “Trickster Defeats the Revolution: Egypt as the Vanguard of the New Authoritarianism”, Middle East Critique 26, no. 3, 2017.

Yahia Zoubir, “A Cronicle of Egypt’s Political Transition from the repressive Mubarak Administration, and The Challenges it now Faces in Achieving Democracy, dalam Egypt in the Aftermath of the Arab Spring”, accord, 11 April 2015, <https://www.accord.org.za/conflict-trends/egypt-aftermath-arab-spring/>.

Yon Mahmudi, Timur Tengah dalam Sorotan; Dinamika Timur Tengah dalam Perspektif Indonesia, Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2020.